



PENGARUH KEMISKINAN, PENGANGGURAN, UPAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PROBOLINGGO

Dita Ayu Cahyani • Sishadiyati

***Abstract.** All humans certainly dream of a prosperous life, but not all get a prosperous life. Therefore, the government undertakes development in order to improve the welfare of its people. Human development is important because high economic growth does not always solve social problems such as poverty, unemployment and welfare. One indicator to measure the level of welfare is the Human Development Index (HDI). This study aims to determine how much the poverty rate, the open unemployment rate, the minimum wage, economic growth, and the realization of local government spending on the Human Development Index (HDI) in Probolinggo Regency. This study uses time series data which was analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that simultaneously the independent variables have a significant effect on the Human Development Index. Partially, the poverty level has a significant negative effect on the Human Development Index, the minimum wage and the realization of local government spending have a significant effect on the Human Development Index. While partially, both the open unemployment rate variable and the economic growth variable have no effect on the Human Development Index in Probolinggo Regency.*

Keywords: *Economic Growth, Human Development Index, Poverty, Unemployment, Wage.*

©2022 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Semua manusia memimpikan kehidupan yang sejahtera tidak kekurangan apapun, tetapi tidak semua orang beruntung dan dapat merasakan hidup yang sejahtera. Salah satu cara yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan melakukan pembangunan. Baik itu pembangunan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi menjadi indikatornya, maupun pembangunan manusia. Sumber daya manusia merupakan input yang berperan penting dalam

Dita Ayu Cahyani (✉)

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : ditaayucahyani4@gmail.com

Sishadiyati

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : sishadiyati.ep@upnjatim.ac.id

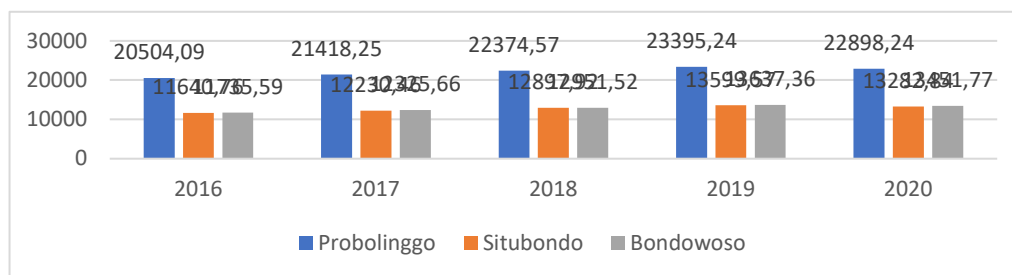
pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ini merupakan penyebab kesejahteraan suatu negara, yaitu pentingnya skala ekonomi dan juga kualitas manusia itu sendiri (Ningrum et al., 2020).

Karena pembangunan daerah dan nasional saling bergantung dan bersinergi, maka pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Pengertian otonomi daerah diikuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Wijaya, 2019). Pembangunan daerah atau pembangunan nasional Indonesia memberikan kemampuan kepada setiap daerah untuk menangani dan mengendalikan persoalan daerahnya sendiri dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu metrik yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah; untuk alasan ini, pembangunan manusia selalu menjadi penekanan utama dari rencana pembangunan ini di semua bidang. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, Indonesia mengakui bahwa hak untuk hidup bermartabat adalah hak asasi manusia yang diakui secara global dan bahwa tugas utama pemerintah adalah memajukan keadilan sosial, mendidik rakyat, dan memajukan kesejahteraan. semuanya dari Indonesia. Manusia adalah titik fokus pembangunan karena mereka adalah subjek dan objeknya

Kabupaten Probolinggo termasuk dalam wilayah tapal kuda yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sedang. Berada di urutan ke-36 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Timur membuat pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Probolinggo tertinggal dari Provinsi Jawa Timur dan daerah tetangga seperti Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. PDRB Kabupaten Probolinggo lebih besar dalam kontribusinya dalam PDRB Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo. Namun PDRB yang lebih besar tersebut tidak membuat Kabupaten Probolinggo memiliki IPM yang tinggi pula.

Gambar 1. PDRB Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan daripada untuk kebutuhan pendidikan dan Kesehatan untuk meningkatkan kualitas diri. Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun

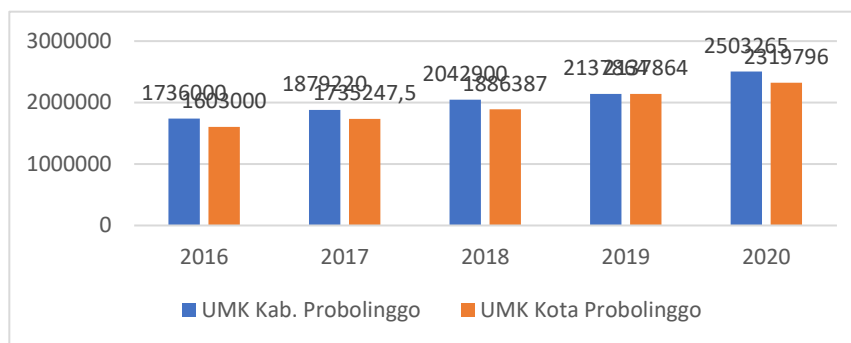


2020 mencapai sekitar 18 persen. Di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo masuk urutan ke 35, atau urutan ke 4 daerah terbanyak angka kasus kemiskinan.

Meningkatkan pendapatan, kesehatan dan pendidikan adalah tiga cara untuk menaikkan indeks pembangunan manusia. Ketika seseorang mendapatkan lebih banyak uang, dia dapat memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kesehatan dan pendidikan serta kebutuhan yang lebih mendasar seperti sandang, pangan dan papan. Pendapatan rata-rata di suatu daerah dibagi dengan penduduk setempat dikenal sebagai pendapatan per kapita. Selain itu, pendapatan per kapita menunjukkan tingkat daya beli penduduk di wilayah tersebut; semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi jumlah pengeluaran. Dari grafik dibawah dapat dilihat jika upah minimum di Kabupaten Probolinggo sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan Kota Probolinggo. Dimana hal ini tidak sebanding dengan nilai IPM yang dimiliki kedua daerah tersebut. Dimana Kota Probolinggo memiliki nilai IPM yang jauh lebih besar disbanding dengan Kabupaten Probolinggo sendiri.

Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Jika seseorang memiliki pendapatan atau upah yang lebih besar maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Dari grafik dibawah dapat dilihat jika upah minimum di Kabupaten Probolinggo sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan Kota Probolinggo. Dimana hal ini tidak sebanding dengan nilai IPM yang dimiliki kedua daerah tersebut. Dimana Kota Probolinggo memiliki nilai IPM yang jauh lebih besar disbanding dengan Kabupaten Probolinggo sendiri.

Gambar 2. Upah Minimum Kabupaten dan Kota Probolinggo



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dengan kewenangannya yang besar harus mampu mendayagunakan alokasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang ada di daerah Kabupaten Probolinggo menunjukkan, bahwa tidak semua daerah dengan jumlah belanja daerah yang tinggi memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi pula. Naiknya realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dalam IPM. Nyatanya, IPM Kabupaten Probolinggo tertinggal jauh dari Kota Probolinggo.

LANDASAN TEORI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang juga merupakan indeks yang dapat menggambarkan evolusi pembangunan manusia secara terukur dan representatif. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan ukuran kinerja pembangunan berdasarkan sejumlah faktor kualitas hidup dasar Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan yang sangat penting. , mengukur aspek fundamental dari perkembangan manusia dan memperluas kebebasan memilih. Teori modal manusia berpendapat bahwa pendidikan adalah sumber investasi sumber daya manusia yang pada akhirnya menghasilkan banyak manfaat (Nainggolan et al., 2021).

Teori kemiskinan

Secara sederhana, kemiskinan adalah kekurangan dari banyak aspek yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan (Nainggolan et al., 2021). Negara berkembang dan terbelakang pada umumnya sangat mudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Negara-negara miskin tetap miskin karena siklus kemiskinan terdiri dari serangkaian kekuatan siklus yang dapat bertindak dan bereaksi satu sama lain. Langkah-langkah seperti tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan yang adil di planet ini, serta kelangkaan pangan dan pendapatan rendah. (Dewi et al., 2016)

Pengangguran

Mankiw (2003) menegaskan bahwa masalah ekonomi makro yang paling serius ialah pengangguran, secara langsung mempengaruhi masyarakat. Kehilangan pekerjaan biasanya mengakibatkan penurunan standar hidup dan tekanan psikologis (Ningrum et al., 2020). Ningrum (2020) juga mengkategorikan jawaban menurut sifatnya, yang diklasifikasikan menjadi:

- 1) Pengangguran terbuka, disebut juga mereka yang ingin bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan, adalah jawaban yang gagal karena ada harapan yang lebih baik (sukarela).
- 2) Pengangguran tersembunyi, atau mereka yang bekerja tetapi tidak melakukannya dengan cara yang sesuai dengan gelar mereka.
- 3) Setengah pengangguran, yang mengacu pada pekerjaan berbasis waktu (jam, hari, minggu, musiman).
- 4) Pengangguran musiman, seperti petani yang membanting tulang di ladang sepanjang hari bahkan ketika tugas yang dihadapi tidak benar-benar membutuhkan kerja sehari penuh.

Dalam survei ini, jawaban terbuka digunakan secara eksplisit, yang menunjukkan bahwa pekerja tersebut sekarang menganggur dan secara aktif mencari pekerjaan.

Upah

Teori upah Karl Marx mendasarkan sistem upah suatu negara pada filosofi dan sistem ekonominya. Teori neoklasik didasarkan pada prinsip penciptaan nilai faktor-faktor produksi. Upah adalah balas jasa atas nilai tambah produksi yang diterima pekerja dari pengusaha. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan diwakili dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditentukan dan dibayar, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, menurut Sukirno dalam Prihastuti (2018), adalah proses jangka panjang peningkatan produksi per kapita yang berkelanjutan dan merupakan tanda pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat diterjemahkan menjadi tingkat kekayaan yang lebih tinggi di suatu komunitas.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan aktivitas ekonomi yang menghasilkan lebih banyak uang, produk, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Ningrum, 2018)

Menurut definisi yang diberikan di atas, pertumbuhan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan status ekonomi suatu negara atau wilayah yang menunjukkan peningkatan output produk dan jasa selama jangka waktu yang panjang.

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah didefinisikan sebagai komitmen pemerintah daerah yang dicatat sebagai penurunan kekayaan bersih. Alokasi daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan negara bagian, kabupaten, atau kota. meliputi tugas-tugas yang harus diselesaikan, tugas-tugas yang dapat dipilih untuk diselesaikan, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk bidang atau domain tertentu yang dibagi antara atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Itu diatur oleh hukum.

METODOLOGI

Penelitian ini digunakan dengan menganalisis secara kuantitatif untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi belanja pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian ini digunakan data yang bersifat *time series* berupa angka-angka yang kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut menggunakan rumus matematis yang sudah ada. Data dalam penelitian ini diperoleh dari BPS. Analisis dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda yang telah memenuhi syarat uji asumsi klasik. Rumus dari Analisis Regresi Linier Berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1TK + b_2TPT + b_3UM + b_4PE + b_5RBPD + e$$

Keterangan:

Y= Indeks Pembangunan Manusia (%)

a= konstanta

b1, b2, b3, b4, b5 = koefisien regresi

TK = tingkat kemiskinan (%)

TPT = tingkat pengangguran terbuka (%)

UM = upah minimum (Rupiah)

PE = pertumbuhan ekonomi (%)

RBPD = realisasi belanja pemerintah daerah (Rupiah)

e=residu

Untuk pengujian hasil analisis regresi linier berganda digunakan uji koefisien determinasi, uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t) dimana data harus memenuhi syarat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada 4, hasil data harus lolos setiap ujinya, maka baru bisa dilakukan uji selanjutnya.



Uji Asumsikasik

Uji Normalitas

Dengan menggunakan analisis uji statistik Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Temuan survei dianggap memiliki distribusi normal atau, jika Asymp, telah lulus uji normalitas. Variabel residual dengan sig, lebih besar dari 0,05 atau 5%. (Ghozali, 2018)

Uji multikolinieritas

Dilakukannya uji multikolinieritas adalah untuk melihat apakah ada gangguan atau tidak terhadap data penelitian, dimana multikolinieritas dapat terjadi jika ada korelasi antar variabel independent. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan nilai *tolerance* harus diatas 0,10 dan nilai VIF harus dibawah 10, maka data penelitian tidak terjadi multikolinieritas. (Ghozali, 2018)

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada data ini, akan digunakan uji dengan metode *run test* dengan pengambilan keputusan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data tidak terjadi autokorelasi.

Uji heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Salah satu cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas ini adalah dengan Glesjer di SPSS. Pengambilan keputusan dengan uji Glesjer adalah jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F (uji simultan)

Uji F-statistik menentukan apakah masing-masing variabel independen model memiliki dampak bersamaan atau bersama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013 dalam Ningrum, 2020). Ketika dilakukan pengujian dengan taraf signifikan pada tabel ANOVA sebesar 0,05, maka terdapat pengaruh yang cukup besar dari variabel independen “bersama” (simultan) terhadap variabel dependen.

Uji t (uji parsial)

Uji t-statistik mengukur sejauh mana satu variabel independen memiliki dampak terhadap variabel dependen sementara semua variabel independen lainnya diasumsikan konstan (Ghozali, 2013). Namun, dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara variabel independen dan dependen jika nilai probabilitas yang diestimasi lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai probabilitas estimasi lebih kecil dari 0,05. (Ningrum, 2020).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk menilai seberapa efektif model dapat menjelaskan variasi dalam variabel bebas penelitian. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu menunjukkan bahwa faktor-faktor independen hampir sama persis memprediksi variabel dependen (Widarjono, 2013).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
		Residual
N		12
Normal Q-Q Plot	Normal	.0000000
	Std. Deviasi	.84422007
Kolmogorov-Smirnov Z	Kolmogorov-Smirnov	.187
	Lilliefors	.187
	Anderson-Darling	-.148
Shapiro-Wilk		.187
Anderson-Darling (Normal)		.20000

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,200 > 0,05$ sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.667E-16	.033		.000	1.000		
Zscore: TK	-.241	.085	-.241	-2.825	.030	.163	6.119
Zscore: TPT	-.078	.062	-.078	-1.264	.253	.310	3.227
Zscore: UM	.718	.107	.718	6.721	.001	.104	9.580
Zscore: PE	-.067	.052	-.067	-1.307	.239	.448	2.230
Zscore: RBPD	.119	.048	.119	2.509	.046	.527	1.899

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar masing-masing variabel dalam model regresi.



Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.02908
Cases ≤ Test Value	0
Cases > Test Value	0
Total Cases	12
Number of Runs	1
7	1 514
Asymp. Sig. (2-tailed)	.130

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) sebesar $0,130 > 0,05$ maka data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data penelitian yang di uji.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	.066	.013		5.252	.002
	Zscore: TK	-.048	.032	-.980	-1.482	.189
	Zscore: TPT	.042	.024	.850	1.769	.127
	Zscore: UM	-.039	.041	-.805	-.973	.368
	Zscore: PE	.028	.020	.571	1.429	.203
	Zscore: RBPD	-.017	.018	-.341	-.925	.391

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Nilai signifikansi dari seluruh variabel yang ada lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji *glesjer*, disimpulkan bahwa data penelitian homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F (uji simultan)

Tabel 5. Uji F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.921	5	2.184	166.778	.000 ^b
	Residual	.079	6	.013		
	Total	11.000	11			

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

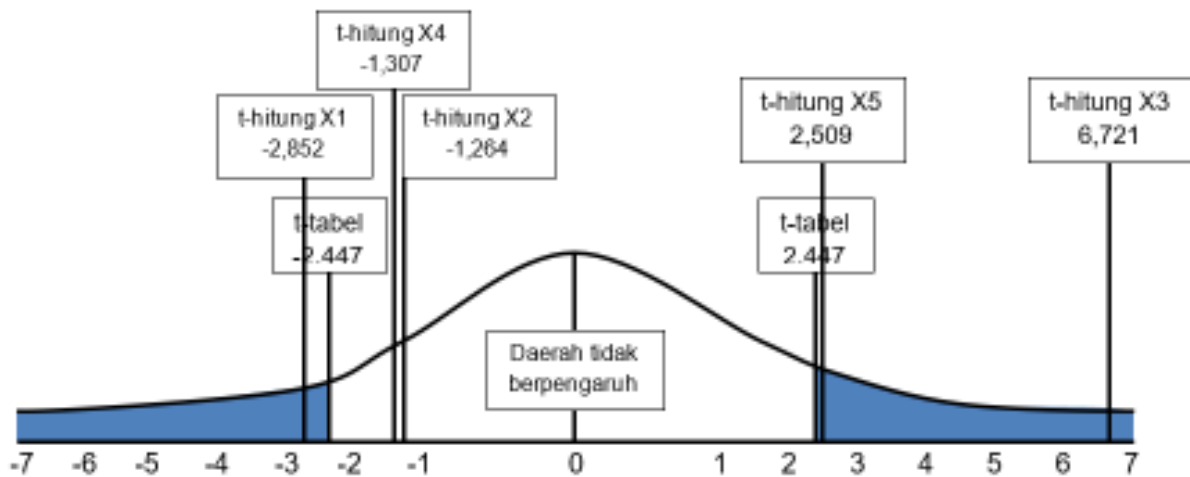
Diketahui nilai F hitung adalah sebesar $166,778 > F$ tabel 3,97, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F disimpulkan bahwa



hipotesis diterima atau dengan kata lain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi belanja pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Uji t (uji parsial)

Gambar 3. Kurva distribusi Tingkat Kemiskinan (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), Upah Minimum (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah (X5) terhadap IPM (Y).



Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Berdasarkan kurva diatas, nilai t-hitung variabel tingkat kemiskinan sebesar $-2,825 > -2,447$ maka dapat disimpulkan bahwa terapat pengaruh yang signifikan antara variabel Tingkat Kemiskinan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai t-hitung variabel Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar $-1,264 < -2,447$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terapat pengaruh yang signifikan antara variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai t-hitung variabel Upah Minimum adalah sebesar $6,721 > 2,447$ maka dapat disimpulkan bahwa terapat pengaruh yang signifikan antara variabel Upah Minimum terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai t-hitung variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $-1,307 < -2,447$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai t-hitung variabel Realisasi Belanja Pemerintah Daerah adalah sebesar $2,509 > 2,447$ maka dapat disimpulkan bahwa terapat pengaruh yang signifikan antara variabel Realisasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.993	.987	.11444193

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas menerangkan bahwa dalam penelitian ini nilai R square dalam tabel model summary menjelaskan jika nilai R square yaitu 0.993 artinya bisa dikatakan 99,3% ke-5 variabel independen dengan bersamaan bisa memberikan penjelasan atas variasi dari IPM adapun untuk yang lainnya sebesar 0,7% disebabkan pengaruh oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Uji Regresi Linier Berganda

$$Y = 4.474E - 16 - 0,241TK - 0,078TPT + 0.718UMK - 0,067PE + 0,119BPD + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan persamaan regresi, nilai konstanta memiliki arah koefisien positif sebesar 4,474E-16, yang menunjukkan bahwa variabel bebas (tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi belanja pemerintah daerah) berpengaruh atau naik satu unit. maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan.
- Berdasarkan temuan penelitian dan perhitungan dari uji regresi linier berganda, variabel 1 atau angka kemiskinan memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,241, artinya dengan asumsi variabel lain tetap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan sebesar 0,241% untuk setiap 1% peningkatan kemiskinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi negatif, menunjukkan korelasi negatif antara IPM dan tingkat kemiskinan. IPM di Kabupaten Probolinggo akan turun jika angka kemiskinan di sana lebih tinggi. Sebaliknya, IPM di Kabupaten Probolinggo akan naik jika angka kemiskinan semakin rendah.
- Menurut hasil penelitian dan perhitungan dari uji regresi linier berganda, koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka adalah negatif sebesar 0,078, yang berarti bahwa dengan asumsi variabel lain tetap konstan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menurun sebesar 0,078% untuk setiap 1% meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Temuan penelitian menunjukkan koefisien regresi negatif, menunjukkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran terbuka dan IPM. IPM di Kabupaten Probolinggo menurun seiring dengan meningkatnya angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut. IPM di Kabupaten Probolinggo akan meningkat jika tingkat pengangguran terbuka menurun.
- Berdasarkan temuan penelitian dan perhitungan dari uji regresi linier berganda, koefisien regresi variabel upah minimum bernilai positif sebesar 0,718, artinya dengan asumsi variabel lain tetap konstan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 0,718 ribu untuk setiap kenaikan 1% pada upah minimum. Menurut temuan yang menguntungkan dari analisis koefisien regresi, terdapat korelasi positif antara IPM dan upah minimum. IPM di Kabupaten Probolinggo naik sebanding dengan upah minimum di daerah tersebut. Sebaliknya, IPM di Kabupaten Probolinggo justru menurun saat upah minimum naik.



- e. Menurut hasil penelitian dan perhitungan dari uji regresi linier berganda, koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi bernilai negatif sebesar 0,067 yang berarti dengan asumsi variabel lain tetap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turun sebesar 0,067% untuk setiap kenaikan 1% pada pertumbuhan ekonomi. Penyelidikan terhadap koefisien regresi menghasilkan hasil negatif, yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara IPM dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Berdasarkan temuan penelitian dan hasil uji regresi linier berganda, koefisien regresi untuk variabel realisasi belanja pemerintah daerah adalah positif sebesar 0,119 yang berarti dengan asumsi variabel lain tetap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,119 miliar untuk setiap kenaikan 1% realisasi belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi bertanda negatif, yang menunjukkan adanya korelasi negatif antara realisasi belanja pemerintah daerah dengan IPM. IPM di Kabupaten Probolinggo akan menurun seiring dengan realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih banyak di daerah tersebut. IPM di Kabupaten Probolinggo akan meningkat jika tingkat pengangguran terbuka menurun.

Pembahasan

Pengaruh Variabel Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2021 sebesar -2,825 dengan nilai signifikansi sebesar 0,030. Hal tersebut menunjukkan terdapat hubungan negatif signifikan antara tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana setiap ada kenaikan pada variabel tingkat kemiskinan akan mengakibatkan penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut (Novita, Yusuf, Iyan, 2017) berpengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap IPM ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kemiskinan dapat menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan (Dewi et al., 2017). Akibatnya mereka tidak mampu memperoleh Pendidikan yang layak. Sehingga masih terdapat penduduk terbelakang yang buta huruf yang minim kemampuan untuk mengelolah sumber daya alam secara produktif.

Pengaruh Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2021 sebesar -2,825 dengan nilai signifikansi sebesar 0,030. Hal tersebut menunjukkan terdapat hubungan negatif signifikan antara tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana setiap ada kenaikan pada variabel tingkat kemiskinan akan mengakibatkan penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut (Novita, Yusuf, Iyan, 2017) berpengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap IPM ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan



pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kemiskinan dapat menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan (Dewi et al., 2017). Akibatnya mereka tidak mampu memperoleh Pendidikan yang layak. Sehingga masih terdapat penduduk terbelakang yang buta huruf yang minim kemampuan untuk mengelolah sumber daya alam secara produktif.

Pengaruh Variabel Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel upah minimum secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2021 sebesar 6,721 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini tentunya sejalan dengan penelitian milik M. Faizin tahun 2021 dan penelitian Dede Edwin Megantara tahun 2020.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setiap tahun, upah minimum di Kabupaten Probolinggo ini mengalami peningkatan. Peningkatan upah minimum ini akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Untuk mengatasi masalah pengupahan ini, pemerintah membuat kebijakan melalui peraturan perundang-undangan. Diantaranya peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1, disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Megantara & Budhi, 2020).

Dampak dari kenaikan pendapatan yang ada di masyarakat tersebut akan berdampak pula pada kemudahan akses dari sisi pendidikan, kesehatan serta perekonomian yang dilakukan masyarakat (Ningrum, 2017).

Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Riau sehingga hasil penelitian tidak dapat diinterpretasikan. Hal ini sejalan dengan penelitian milik Novita Dewi tahun 2017. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Chalid dan Yusuf, 2014). Tidak ditemukannya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kabupaten Probolinggo disebabkan karena pembangunan ekonominya masih terfokus dan belum menyeluruh selain itu karena pembangunan ekonomi terfokus hanya kepada beberapa daerah saja, lebih dari separuh Kecamatan yang ada di wilayah ini belum terjadi pembangunan yang merata sehingga hasil penelitian tidak terlihat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM.

Pengaruh Variabel Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel realisasi belanja pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah memang memiliki dampak yang baik terhadap pembangunan manusia. Anggaran Belanja Pemerintah Daerah akan mempunyai



peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Realisasi Belanja Pemerintah Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/prasarana. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect* ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Anugrah Priambodo, 2016).

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Adapun variable yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo adalah tingkat kemiskinan, upah minimum, dan realisasi belanja pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan berpengaruh ke arah negative terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo. Apabila tingkat kemiskinan mengalami kenaikan maka indeks pembangunan manusia mengalami penurunan, dikarenakan kemiskinan mengakibatkan suatu individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan sulit dicapai. Upah minimum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia yang artinya terjadi pengaruh yang searah dimana jika upah minimum mengalami peningkatan maka indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan. Peningkatan upah ini dapat memudahkan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga standar hidup layak diharapkan mampu dicapai. Realisasi belanja pemerintah daerah juga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Belanja pemerintah daerah yang dilakukan pemerintah ini tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya apabila dikelola dengan baik. Pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu dampak riil yang dirasakan adalah adanya pembangunan infrastruktur yang baik. Melalui pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat daerah setempat. Sementara itu variable yang tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo adalah variable tingkat pengangguran terbuka karena masyarakat setempat dapat melakukan pekerjaan informal seperti bertani dan variable pertumbuhan ekonomi dikarenakan terbatasnya jumlah sampel penelitian yang sedikit.

Saran

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat lebih memperhatikan masyarakat miskin dengan membuat program yang pro masyarakat miskin agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi masyarakat miskin dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya seperti membuka pelatihan dan keterampilan pengolahan produk jadi yang berasal dari hasil pertanian dan perikanan. Yang diharapkan mampu menambah penghasilan sehari-hari sehingga mampu menambah kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan nilai indeks pembangunan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhudhuri, M. (2017). Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.12>
- Anugrah Priambodo. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 270.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Probolinggo dalam Angka. *Probolinggo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo*
- Badan Pusat Statistik. (2021). Provinsi Jawa Timur dalam Angka. *Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*
- Basuki Pujoalwanto. (2014). Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis Dan Empiris. In *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Chalid, N. & Yusuf, Y. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau, *Jurnal Ekonomi*, Vol.22, No. 2, Juni 2014. h.3
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, 2016. Metodologi penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 119
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). 濟無No Title No Title No Title. 8–19.
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Diba, S. P. S., Kawung, G. M. V, & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 13–22.
- Dior D. 2022. Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Dkk, A. K. (2016). *Indikator Kemiskinan Dan Klarifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia. 2015. hal.2
- Erlina. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi 2. Cetakan Pertama. USU Press. Medan.
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar (1995). *Basic Econometrics*. (3rd edition ed.). New York: Mc-Graw Hill, Inc.
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan*. https://www.google.co.id/books/edition/Perencanaan_Pembangunan_Daerah_Pende



- kata/GSxjDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta. Penerbit Ekonisia. hal 59-60.
- Komariah, D., Yogiandoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Kuncoro, M. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan. Airlangga. 2010
- Anugrah Priambodo. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Megantara, D. E., & Budhi, M. K. (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal ekonomi Pembangunan*, 9(1), 91–119.
- Menteri Keuangan. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 tentang “Klasifikasi Anggaran”. Jakarta.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 446–455.
- Nainggolan, L. E., Sembiring, L. D., & Nainggolan, N. T. (2021). Analisis Pengaruh Berdampak Pada Kemiskinan. *Open Journal Systems*, 15(10), 5457.
- Nanang, M. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Napitupulu, A. S. (2008). *Apriliyah S. Napitupulu : Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap..., 2007. USU e-Repository © 2008*.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192. doi: 10.22219/jep.v15i2.5364.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja
- Prayitno, H. & Santosa, B. *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Galia Indonesia, 1996). h. 102.
- Prihastuti, A. H. (2018). Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 4(1), 1–8.
- Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, Surabaya, Dharma Ilmu, 2012
- S. Siregar. (2017). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan SPSS*.
- Risma N. 2022. Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks



Dita Ayu Cahyani, Sishadiyati. Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo.

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Sarina. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF->

JbvpNjwAhWzIEsFHYpyB2IQFjAAegQlAxAD&url=http%3A%2F%2Frepositori.uin-alauddin.ac.id%2F15331%2F1%2FANALISIS%2520FAKTOR-FAKTOR%2520%2520YANG%2520%2520MEMPENGARUHI.pdf&usg=AOvVaw0iY_

Syofya, H. (2018). *Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan*. 15(2), 177–185.

Todaro, Michael, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Pearson Education Limited. United Kingdom: 2016), h.20

Tambunan, Tulus T.H. 2014. *Perekonoian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Usmaliadanti, C. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. In *Journal of Economics Undip Repository* (Vol. 2, Issue 1).

Zamruddin Hasid, P. I. L. S. S. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Analysis on factors affecting to human development index in sulawesi barat province. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN>

